UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barak, Aharon dan Doron Kalir, 2012, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitation*, Cambridge University Press, Cambridge.

Bird, Richard M. dan Pierre-Pascal Gendron, 2007, *The VAT in Developing and Transitional Countries*, Cambridge University Press, New York.

Brotodihardjo, R. Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung.

Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dora, 2018, *Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*, DDTC, Jakarta.

Chidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer, ERESCO.

Hadjon, Philipus M, R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, J. B. J. B ten Berge, P. J. J van Buuren, F. A. M Stroink, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.

OECD, 2015, *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*, OECD Publishing, Paris.

OECD, 2017, *Intenational VAT/GST Guidelines*, OECD Publishing, Paris.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.

R., Soemarso S., 2007, *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

Remmelink, Jan, 2013, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Rolim, Joao Dacio, 2014, *Proportionality and Fair Taxation*, Kluwer Law International, Zuid-Holland.

Rosdiana, Haula, 2005, *Perpajakan*, Rafagrafindo Perkasa, Jakarta.

Rusdji, Muhammad, 2007, *PPN & PPnBM*, Indeks, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soemitro, Rochmat, dan Dewi Kania Sugiharti, 2020, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sukardji, Untung, 2018, *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2015*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW., 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syamsuddin, M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahrum, Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Bengkalis-Riau.

Vanistendael, Frans, "Legal Framework for Taxation", dalam Victor Thuronyi (Ed.), 1998, *Tax Law Design and Drafting,* IMF, Washington D.C.

Waluyo, 2009, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85) sebagaimana telah beberapa kali diubah

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1065).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1109).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut Serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Aji, Viky Bayu Setyo, 2022, *Tinjauan Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital dalam Game Online*, Tesis, Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan.

Nafil, Febrian Aufa, 2025, *Pengawasan Pemungutan PPN terhadap Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Penyedia PMSE yang Berkedudukan di Luar Daerah Pabean*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Puspitasari, Silvia, 2023, *Analisis Kebijakan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pemanfaatan Produk Digital dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Ditinjau dari Asas Economic of Collection*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putra, Mahardhika Sulistyo, 2021, *Aspek Keadilan dalam Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Produk terhadap Produk Digital dari Luar Negeri dalam Transaksi E-Commerce*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Jurnal

Damuri, Yose Rizal, Adinova Fauri, dan Dandy Rafitrandi. "*Perkembangan dan Regulasi E-Commerce di Indonesia*." Centre for Strategic and International Studies, Desember 2020. http://www.jstor.org/stable/resrep28867.

Evans Emanuel Sinulingga, "*Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*", Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 1, Januari-Maret 2013.

Gazali, Narumi Bungas, dan Paulus Soelistyo, "*Pemajakan Layanan OTT Yang Melakukan Kegiatan Usaha Secara Virtual di Indonesia*", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 4, November 2022.

Kesuma, M. Fathir Haq, dan Nurhidayati, "*Does the Use of Virtual Private Network (VPN) Affect The Collection of Value Added Tax (VAT)?*", Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4, No. 1, Maret 2022.

Khan, Abdul Gaffar, "*Electronic Commerce: A Study on Benefits and Challenges in an Emerging Economy*", Global Journal of Management and Business Research: B Economics and Commerce, Vol. 16, No.1, 2016.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Lailam, Tanto, Putri Anggia, dan M. Luthfi Chakim, "*The Proportionality Test Models of Competing Rights Cases in the Civil and Common Law Systems: Lesson to Learn for Indonesia*", Hasanuddin Law Review Vol. 10 Issue 2, Agustus 2024. https://doi.org/10.20956/halrev.v10i2.4844.

Marbun, Ronaldi, dan Ning Rahayu, "*Tinjauan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Domestik dan Asing,*" Owner Vol. 7, No. 2, April 2023 https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1419.

Mustajibah, Tutik, dan Agus Trilaksana, "*Dinamika E-Commerce di Indonesia tahun 1999-2015*", Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 10, No. 3, 2021.

Nugroho, Adrianto Dwi, "*Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan*", Jurnal Mimbar Hukum, 2011.

Sinulingga, Evans Emanuel, *"Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000*", Jurnal Lex Administratum 1, 2013.

Susanto, Sri Nur Hari, *"Karakteristik Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi"*, Administrative Law & Governance Journal 2 Issue 1, 2019.

Wulandari, Destiny, "*Tentang PPN PMSE Indonesia: Masih Ada yang Perlu Diperbaiki?*", Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol. 7, No. 2, November 2023. https://doi.org/10.31092/jpi.v7i2.2494.

Yuesti, Anik, I Nengah Sudja, Tri Wahyuningsih, dan Carmen Castro Mennes, *"Correlation of Tax Behavior with Tax Compliance"*, International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol. 9 Issue 5, 2019.

E. Artikel dalam Internet

CSI Consultant, "Mengenal Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)", *https://csiconsultant.co.id/mengenal-perdagangan-melalui-sistem-elektronik/*, diakses 2 Oktober 2025.

DDTCNews, "Prinsip Netralitas Harus Melekat dalam PPN, Apa Maksudnya?", *https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/20004/prinsip-netralitas-harus-melekat-dalam-ppn-apa-maksudnya*, diakses 8 Oktober 2025.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal, ”Fiskalpedia: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)", *https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn*, diakses 8 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Pajak, “PPN atas Produk dan Jasa Digital melalui Transaksi Elektronik”, *http://www.pajak.go.id/id/digitaltax*, diakses 2 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Pajak, “Tunjuk Shutterstock, Kini Sudah Ada 81 Pemungut PPN PMSE", *http://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/tunjuk-shutterstock-kini-sudah-ada-81-pemungut-ppn-pmse*, diakses 2 Oktober 2025.

Direktorat Jenderal Pajak, “Blokir, Blokir, Blokir demi Negara”, *https://pajak.go.id/en/node/42535*, diakses 7 April 2026.

HBMS Consulting “Konsep Dan Terminologi PMSE (*E-Commerce*) dan Dasar Hukum Perpajakannya", *http://www.hbmsconsulting.com/content-1167/pajak-summary/konsep-dan-terminologi-pmse-e-commerce-dan-dasar-h.aspx*, diakses 8 Oktober 2025.

Ida Ayu Rasthiti Adnyani, PMSE: Beleid Prematur Berkedok Covid-19, *https://ortax.org/pmse-beleid-prematur-berkedok-covid-19,* diakses 26 Februari 2026.

Kementerian Komunikasi Dan Digital, "Kemkominfo: Pertumbuhan E-Commerce Indonesia Capai 78 Persen", *https://www.komdigi.go.id/berita/sorotan-media/detail/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen*, diakses 2 Oktober 2025.

Kontan.co.id, "Transaksi Ecommerce Indonesia 2019-2024”, *https://pusatdata.kontan.co.id/infografik/88/Transaksi-Ecommerce-Indonesia-2019-2024*, diakses 1 Oktober 2025.

F. Wawancara

Widitya Yoga Pradipta dan Hari Agung Nugroho. Wawancara dengan Pemeriksa Pajak Pertama dan Penelaah Teknis Kebijakan Tk. II Direktorat Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Zoom Meeting, 6 Februari 2025.

G. Dokumen

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Tinjauan Proporsionalitas Teguran dan Sanksi Pemutusan Akses Terhadap Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik**
Amanda Aisyah Andiana, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LL.M., LL.D.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, "Statistik E-Commerce 2023 Vol. 6, Badan Pusat Statistik", 2025.

Pratiwi, Dwi Resti, dan Damia Liana, "Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)", *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, Juni 2021.

MDDP, "Split Payment – 20 Things that You Have to Know", *MDDP Michalik Dluska Dziedzic I Partnerzy Tax Advisory Company S.A.*, 2020.